

## ABSTRAK

Isu paling mengemuka dalam globalisasi adalah penerapan sistem pasar bebas yang saat ini sedang melaju kencang. Keluar-masuknya barang dan jasa melintasi batas negara mempunyai manfaat bagi konsumen, yakni konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih barang dan jasa yang ditawarkan. Namun, disisi lain timbul dampak negatif yakni konsumen akan menjadi sasaran para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagaimana tanggung jawab dan sanksi produsen terhadap peredaran obat yang mengandung DNA babi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi peredaran obat yang mengandung DNA babi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian Hukum normatif empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (Undang-undang) pada setiap peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat/konsumen.

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Pharos Indonesia selaku produsen Viostin DS sangat merugikan bagi konsumen, khususnya konsumen muslim, baik kerugian dari segi jasmani maupun rohani ,dalam hal ini konsumen merasa tidak nyaman karena produk tersebut mengandung bahan yang bersumber dari babi, dimana konsumen muslim diharamkan untuk memakan daging babi ataupun turunannya. Sebagai antisipasi dan perlindungan konsumen, BPOM sebagai Lembaga Pemerintahan Non-Kementrian yang bertugas menyelenggarakan tugas Pemerintahan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan menindaklanjuti kasus kasus peredaran produk Viostin DS yang mengandung DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) Babi, yaitu dengan memberikan sanksi peringatan keras kepada PT. Pharos Indonesia dan memerintahkan untuk menarik produk tersebut dari peredaran serta menghentikan proses produksi, serta menghimbau kepada seluruh masyarakat selaku konsumen apabila masih menemukan produk tersebut dari peredaran agar melapor ke BPOM. Kemudian konsumen yang selama ini mengalami kerugian dan keberatan terhadap konsumsinya ,dapat mengajukan keberatan ke BPSK maupun Dinas Kesehatan, hal ini dilakukan agar konsumen yang merasa dirugikan mendapatkan kompensasi

## ABSTRACT

*The most advanced issue in globalization is the application of a free market system that is currently on the move. The influx of goods and services across state borders has benefits for consumers, i.e. consumers have the freedom to choose the goods and services offered. However, on the other hand, there is a negative impact that consumers will be targeted by businesses to make the most profit. How the manufacturer's responsibilities and sanctions against the circulation of drugs containing pig DNA under the Consumer Protection Act and halal product guarantee act, as well as how the Food and Drug Administration's role in tackling the circulation of drugs containing pig DNA..*

*The research method used is normative-empirical research. Empirical normative law research is a legal study on the enforcement of normative legal provisions (Laws) on every event that occurs in a society / consumer.*

*Violations committed by PT. Pharos Indonesia as a producer of Viostin DS is very detrimental to consumers, especially muslim consumers, both physical and spiritual disadvantages , in this case consumers feel uncomfortable because the product contains ingredients sourced from pigs, where muslim consumers are forbidden to eat pork or derivatives. In anticipation and protection of consumers, BPOM as a Non-Ministerial Government Agency in charge of conducting government duties in the field of Food and Drug Control followed up the case of the circulation of Viostin DS products containing DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Pigs, namely by imposing harsh warning sanctions on PT. Pharos Indonesia and ordered to withdraw the product from circulation and stop the production process, and appealed to all people as consumers if they still find the product from circulation in order to report to BPOM. Then consumers who have suffered losses and objections to their consumption ,can submit objections to BPSK or the Health Office, this is done so that consumers who feel harmed get compensation.*